

**ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NO.
421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM TENTANG PENYEBARAN
INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN
KEBENCIAN/PERMUSUHAN BERDASARKAN SARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:
MUNIF AINUNAJIB
NIM: 132211068

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Munif Ainunajib

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

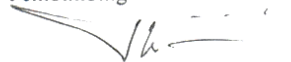
Nama : Munif Ainunajib
Nomor Induk : 132211068
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA
TIMUR NO. 421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM
TENTANG PENYEBARAN INFORMASI
UNTUK MENIMBULKAN
KEBENCIAN/PERMUSUHAN
BERDASARKAN SARA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Oktober 2019
Pembimbing



Drs. H. Muhammad. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax/ (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

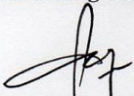
Nama : Munif Ainunajib
NIM : 132211068
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NO.
421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN
KEBENCIAN/PERMUSUHAN BERDASARKAN SARA
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada
tanggal: **18 Oktober 2019**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji.....Pemisah Seksi(berkelanjutan).....

Ketua Sidang/Penguji,

Sekretaris Sidang / Penguji,

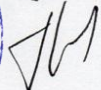

Rustam Dahar K.A.H. M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 197205121999031003

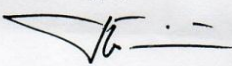
Penguji Utama I,

Penguji Utama II,


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H
NIP. 197308212000031002

Pembimbing 1,


Drs. H. Muhammad. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسْتَوْقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim (QS. Al-Hujurat: 11).*

*Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 2012, hlm. 812.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

Kedua Orang tuaku tercintayang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini. Semoga tetap dalam perlindungan Allah SWT.

Kepada Dosen Pembimbing, yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kakak dan adikku yang tercintayang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.

Teman-temanku yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Teman-Temanku jurusan HPI, Fak Syariah dan Hukum yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa. Khususon bagi teman angkatan 2013 yang selalu mensupport pagi siang malam.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Bambang Kiswotomo alias Ibhas Kiswotomo telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Atas perbuatan tersebut PN Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi antara lain: menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas), oleh karena itu, selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan. Sebagai rumusan masalah: bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primernya adalah Putusan Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim. adapun data sekundernya yaitu buku-buku yang dapat menunjang skripsi ini. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PN Jakarta Timur yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yaitu 6 (enam) tahun. Jika PN Jakarta Timur bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun. Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3

tahun atau setidaknya-tidaknya di atas 1 tahun 6 bulan. Menurut penulis, hukuman yang bertentangan dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversial sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil, ukurannya adalah kesebandingan. Dari segi hukum Islam, penyebaran ujaran kebencian dalam hukum pidana Islam, merupakan perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan atau nama baik dari seseorang, yaitu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, mencaci maki, menggunjing, dan sebagainya yang menyebabkan timbul rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang. Oleh karena itu, perbuatan ujaran kebencian masuk dalam klasifikasi *ta'zir* dalam kategori *jarimah* yang belum ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Putusan, PN, Penyebaran Informasi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi iniberjudul: ***“ANALISIS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NO. 421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM TENTANG PENYEBARAN INFORMASI UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN/PERMUSUHAN BERDASARKAN SARA”***. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Agselaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhammad. Solek, M.Aselaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongoyang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-

ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذريه
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية والشمسية/SS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	22

BAB II : TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

A. Ujaran Kebencian Menurut KUHP/Hukum	
Positif.....	25
1. Pengertian Ujaran Kebencian	25
2. Unsur-unsur Ujaran Kebencian	28

3. Dasar Hukumnya.....	30
4. Sanksi	34
B. Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana	
Islam	41
1. Ujaran Kebencian.....	41
2. Klasifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	46
3. Sanksi	58
BAB III: PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN	
A. Sekilas Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....	65
B. Duduk Perkara	68
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	73
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
E. Pertimbangan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Timdalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian.....	77
F. Amar Putusan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Timdalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencia.....	85

**BABIV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSANPN JAKARTA TIMUR NOMOR
421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN
UJARAN KEBENCIAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.TimdalamKasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian	91
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Amar Putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Timdalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian.....	120

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
C. Penutup	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hate speech/ujaran kebencian merupakan istilah untuk perbuatan berupa ungkapan dalam pidato, ceramah, orasi, tulisan, gambar maupun sosial media yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau penyebaran berita bohong. Perbuatan tersebut berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa bahkan konflik sosial. Bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. *Hate speech* telah menjadi permasalahan hukum dan sosial saat ini. Di era globalisasi yang didukung media informasi tanpa batas, banyak pihak atas dasar kebebasan berekspresi melanggar hak asasi orang lain. Yaitu mengeluarkan ujaran atau ungkapan yang tidak didasarkan pada bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan. Kasus-kasus seperti pencemaran nama baik dan hasutan kebencian masih menghiasi pemberitaan di media massa.¹

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*The new form of antisocial behavior*”. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “**kejahatan dunia maya**”. Dimensi baru dari *transnational crime* (kejahatan transnasional), dan dimensi baru dari *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Bahkan dapat dikatakan sebagai dimensi baru dari *environmental crime* (kejahatan lingkungan).²

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* menghasilkan berbagai bentuk

¹ Lihat Peraturan Kapolri nomor SE (Surat Edaran)/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 245.

lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. *Cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai **jaringan komputer** sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.³

Kejahatan komputer yang banyak terjadi seperti menjadi “momok” bagi para pengguna. Maka, untuk memperkecil angka kejahatan komputer dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Namun, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.⁴

³ Siswantio Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. v-viii. Dodo Zaenal Abidin, “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor* Vol. 10 No. 2 Oktober 2015 ISSN 1907-6738, hlm. 509.

⁴ Ria Safitri, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Perguruan Tinggi (*Law on Electronic Information and Transactions for*

Semakin meningkatnya teknologi informasi semakin banyak juga dampak positif dan negatifnya. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Selain itu dampak negatifnya dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Semakin maraknya tindakan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini semakin membuat para kalangan pengguna jaringan telekomunikasi menjadi resah.⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 Undang-Undang No.

Universities)”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), pp.197-218, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10279, hlm. 199.

⁵ Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565, hlm. 326-346.

11 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA.⁶

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Terkait dengan putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, bahwa terdakwa Bambang Kiswotomo alias Ibbas Kiswotomo telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Atas perbuatan tersebut PN Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi antara lain:

⁶ Hendy Sumadi, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015, hlm. 185.

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas), oleh karena itu, **selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) ditegaskan:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, menegaskan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah yang muncul, apakah putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebar ujaran kebencian di Jakarta Timur sudah sesuai dengan tujuan pembedaan? Dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebar ujaran kebencian di Jakarta Timur sudah sesuai?

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,⁷ beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian

⁷Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013, hlm. 312

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Pidana Islam, terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. .

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang (legislatif dan eksekutif), khususnya dalam pembentukan Undang-Undang ITE di masa mendatang. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada para ulama dan pembentuk undang-undang

terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah Undang-Undang ITE.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan data pendukung, di antaranya:

Pertama, A. Yudha Prawira dengan judul skripsi “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015” di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan surat edaran Kapolri No SE/06/X/2015 antara lain ialah upaya non penal (preventif dan *pre-emptif*) dan upaya penal (represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan ujaran kebencian ini yaitu upaya preventif dan *pre-emptif* yang dilakukan kepolisian dalam

menanggulangi kejahatan ujaran kebencian antara lain yaitu melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengertian ujaran kebencian (*hate speech*), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam melakukan penanggulangan tindak pidana/kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) agar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.⁸

Perbedaan penelitian A. Yudha Prawira dengan penelitian penulis sebagai berikut;

1. Fokus penelitian di atas adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, sedangkan penelitian saat ini mengkaji putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
2. Penelitian di atas hanya meninjau dari sudut pandang hukum

⁸ A. Yudha Pratama, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015”, **Skripsi**, Lampung : Universitas Lampung, 2016, hlm. 67.

positif, sedangkan penelitian saat ini tidak hanya ditinjau dari sudut pandang hukum positif, namun juga menggunakan pendekatan hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi MOH. Putra Pradipta Duwila tentang “*Tijauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*”. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian di media sosial yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan hangat, penulis melakukan penelitian di unit *Cyber Crime* Polda Sulawesi Selatan dan dalam wawancara dengan Kanit unit *cyber crime* bapak AKP. Hari Agung P.e.p pada tanggal 10 Oktober 2016, penulis menemukan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi tetapi sebagian pelaku ujaran kebencian itu sendiri mengetahui tentang etika bermedia sosial atau bisa dibilang bahwa para pelaku sadar jika ujaran kebencian yang mereka lakukan itu salah, akan tetapi karena terbawa emosi mereka pun meluapkan

kekesalannya dengan menulis status bernada kebencian di media sosial sehingga sampai melupakan etika dalam bermedia sosial.⁹

Perbedaan penelitian MOH. Putra Pradipta Duwila dengan penelitian penulis sebagai berikut;

1. Fokus penelitian di atas adalah ujaran kebencian di media sosial, sedangkan penelitian saat ini mengkaji putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus penyebaran ujaran kebencian sebagai *cybercrime illegal contents*
2. Penelitian di atas hanya meninjau dari sudut pandang sosiologis hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan hukum pidana Islam.

Ketiga, Adreanus Sapta Anggara Pamungkas tahun 2016 tentang “Perspektif HAM Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”. Substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian

⁹ Moh. Putra Pradipta Duwila, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial*”, **Skripsi**, Makasar : Universitas Hasanudin Makasar, 2016, hlm. 52.

berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumit, di dalam surat edaran, arti ujaran kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebenarnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.¹⁰

Perbedaan penelitian Adreanus Sapta Anggara

Pamungkas dengan penelitian penulis sebagai berikut;

¹⁰ Adreanus Sapta Anggara, *Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*, **Skripsi**: Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 80

3. Fokus penelitian di atas adalah penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial perspektif HAM, sedangkan penelitian saat ini mengkaji putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus penyebaran ujaran kebencian sebagai *cybercrime illegal contents*
4. Penelitian di atas hanya meninjau dari sudut pandang Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan hukum pidana Islam.

Keempat, skripsi karya Muhammad Mujahidin tahun 2013 dengan judul: *Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.¹¹ Penulis skripsi ini menyatakan bahwa berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008

¹¹ Muhammad Mujahidin, “*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, **Skripsi**: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013, hlm. 18.

termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam atau *fiqih jinayah* masuk dalam ranah *jarimah* takzir bukan termasuk jarimah *qisas* dan *hudud*, sebab bisa dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini, sehingga diperlukan wewenang khusus kepada *ulil amri* (pemimpin) untuk menjatuhkan hukum atas kasus tersebut.

Perbedaan penelitian Muhammad Mujahidin dengan penelitian penulis, yaitu fokus penelitian di atas adalah sanksi pidana pencemaran nama baik/penghinaan via jejaring sosial, sedangkan penelitian saat ini mengkaji putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus penyebaran ujaran kebencian sebagai *cybercrime illegal contents*.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis mempunyai nilai kebaharuan dan tidak mungkin dapat melakukan duplikasi atau plagiat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian penulis

memiliki nilai orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹² Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹³

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹⁴ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

¹⁴ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁶ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini meneliti putusan Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini Putusan Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*; 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif*

Pemikiran Satjipto Rahardjo; 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

Bab II Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang meliputi: tinjauan umum tentang ujaran kebencian, tindak pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam (tindak pidana dalam hukum positif, jarimah dalam hukum pidana Islam). Pemidanaan (pemidanaan dalam hukum positif, pemidanaan dalam hukum pidana Islam).

Bab III Putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian. Bab ini memaparkan duduk perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian, amar putusan hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam kasus tindak pidana penyebaran ujaran kebencian.

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/PID.SUS/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

A. Ujaran Kebencian Menurut KUHP/Hukum Positif

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Terminologi ujaran kebencian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari dua suku kata yakni Ujar-an (perkataan yang diucapkan) dan benci, ke-benci-an (perasaan benci). Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri merupakan suatu perbuatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang (individu) atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya. Secara hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan

dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindak tersebut.¹

Hate speech atau ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran. Dalam *Oxford Dictionary* *hate speech* diartikan sebagai perkataan yang mengekspresikan kebencian dan intoleransi terhadap kelompok sosial, biasanya berbasis ras dan seksualitas.²

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau

¹ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 188.

² Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian/*Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi", *Jurnal Iqtisad*, Vol 5, No 2 (2018), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/2551>, hlm. 3

kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong.³

³ Gusti Ayu Made Gita Permatasari, dan Komang Pradnyana Sudibya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Media Processor* Vol. 10 No. 2 Oktober 2015 ISSN 1907-6738, hlm. 6.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *hate speech* telah menjadi permasalahan hukum dan sosial saat ini. Di era globalisasi yang didukung media informasi tanpa batas, banyak pihak atas dasar kebebasan berekspresi melanggar hak asasi orang lain. Yaitu mengeluarkan ujaran atau ungkapan yang tidak didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kasus-kasus seperti pencemaran nama baik dan hasutan kebencian masih menghiasi pemberitaan di media massa.

2. Unsur-unsur Ujaran Kebencian

Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertuang dalam Pasal 28 jo 45 ayat(2),⁴ Pasal 45A ayat (2).⁵ Jika Pasal 28 jo 45 ayat (2) UU

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“. “Dipidana yang sama seperti ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)“.

Ada dua bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Tindak pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan: menyebarkan
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ayat (2) adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁶

3. Dasar Hukumnya

Kemajuan dunia elektronika berkaitan erat dengan perkembangan dunia internet. Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected – networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain.⁷ Kebutuhan manusia akan informasi dan saling bertukar informasi untuk keperluan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing-masing. Dunia saat ini sudah semakin terkoneksi dan salah satu

⁶ Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565, hlm. 331.

⁷ Darma, dkk, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Jakarta: Mediakita, 2015, hlm. 1

hal yang paling menarik dari keterkoneksian ini adalah internet sebagai dinamika dunia elektronika.⁸ Realitas membuktikan bahwa banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan dunia elektronik, seperti melakukan ujaran kebencian dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan :

- a. Pasal 156 KUHP
- b. Pasal 157 KUHP
- c. Pasal 310 KUHP
- d. Pasal 311 KUHP
- e. Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

⁸ Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung: Rama Widya, 2016, hlm. 10.

- f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁹

Pasal 310 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP:

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.”

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”,

⁹ Gusti Ayu Made Gita Permatasari, dan Komang Pradnyana Sudibya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Media Processor* Vol. 10 No. 2 Oktober 2015 ISSN 1907-6738, hlm. 7.

yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang

biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam

lapangan seksual. Menurut R.Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam yaitu :

- a. Menista secara lisan (*smaad*);
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
- c. Memfitnah (*laster*);
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
- e. Mengadu secara *memfitnah* (*lasterlijke aanklacht*);
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).¹⁰

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 225.

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4. Sanksi

Adapun tentang kata “sanksi”, bahwa sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹¹ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹²

¹¹ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 29.

¹² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 18.

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:¹³

- a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

¹³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 35-36.

- d. Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, memertakutkan, memertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹⁴ Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.¹⁵ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*), dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.¹⁶ Sanksi pada umumnya adalah

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 36.

¹⁵ Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, dkk., "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 496.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 36.

alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹⁷

Terkait dengan sanksi terhadap ujaran kebencian, bahwa kebijakan kriminal yang dianut menurut UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dapat dilihat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, atau perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, yakni:

Pasal 27 UU ITE

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹⁷Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 2012, hlm. 29.

Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan rumusan perbuatan yang dilarang di atas, adalah penggunaan sarana informasi elektronik dalam kegiatan transaksi elektronik bukan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang bertujuan untuk berperan dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sarana informasi elektronik dalam transaksi elektronik tersebut yang berdampak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang pada akhirnya memberikan akibat kerugian bagi penyelenggara Negara, orang, badan hukum, dan masyarakat lainnya.¹⁸

Bunyi Pasal 28 UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sebagai

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyani*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 65

berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Adapun ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45, 45A, 45B Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 45 Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A Undang-Undang No. 19 tahun 2016:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Ujaran Kebencian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hidup dalam Islam, Allah SWT mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Bahwa perbuatan yang mencela orang lain itu adalah haram. Ujaran kebencian (*hate speech*) sangat erat kaitannya dengan pencemaran nama baik. Karena dampak yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) akan merendahkan dan mencederai nama baik seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.¹⁹

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan

¹⁹ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 192.

martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.²⁰ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

- a. *Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 60-61.

- c. *Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.²¹

Adapun menurut Imam al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab *Tafsîr al-Jalâlain*, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah

²¹ Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565, hlm. 408.

memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.²²

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik dikategorikan dalam hukuman *ta'zîr*, yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh *syara'*, melainkan diputuskan oleh *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.²³

Buruk sangka (*suudzhan*) adalah haram, sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman berburuk sangka itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukan seseorang kepada diri sendiri atau di dalam hati, sehingga kita berprasangka buruk tentang seseorang. Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat di dalam diri orang lain. Bisikan

²² Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 428.

²³ Nur Sa'idatul Ma'nunah, *op.cit.*, hlm. 408.

hati yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu dimaafkan. Sedangkan, yang dilarang adalah berprasangka buruk, dimana persangkaan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.²⁴

Imam Al-Qurthubi menerangkan bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat, akan tetapi tanpa disertai dengan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Tidaklah semata-mata Rasulullah SAW melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu, kecuali karena perbuatan tersebut bias berdampak buruk. Hal itu sama saja dengan fitnah yang merupakan bagian dari ujaran kebencian. KH. Nasruddin Umar menerangkan bahwa ujaran kebencian itu adalah fitnah, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Pertama adalah

²⁴ Imam al-Gazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth, hlm. 340.

penghinaan, kedua berbuat tidak menyenangkan dan yang ketiga adalah provokasi. Hal ini bisa dipidana.²⁵

2. Klasifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ditinjau dari aspek/segi berat ringannya hukuman, *jarîmah* dapat diklasifikasikan kepada tiga bagian antara lain: *jarîmah qisâs/diyat*, *jarîmah hudûd*, dan *jarîmah ta'zîr*.²⁶

1) *Jarîmah qisâs* dan *diyat*

Jarîmah qisâs dan *diyat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan

²⁵ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 193.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
 - b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
- Jarîmah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- (1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- (2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- (3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),

(4) Penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan

(5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ).²⁷

2) *Jarîmah Hudûd*²⁸

Jarîmah hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarîmah hudûd* itu sebagai berikut.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarîmah hudûd* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarîmah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarîmah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak

²⁹ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011, hlm. 14.

diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup

- 3) *Jarîmah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarîmah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarîmah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarîmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarîmah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannnya adalah hukum bunuh.

Dalam *jarîmah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarîmah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah

juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.³⁰

3) *Jarîmah Ta'zîr*

Jarîmah ta'zîr adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*. Pengertian *ta'zîr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zîr* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zîr* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zîr* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17-18.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zîr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarîmah ta'zîr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarîmah ta'zîr* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarîmah hudûd* dan *qisâs* maka *jarîmah ta'zîr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarîmah ta'zîr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan

qisâs, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarîmah ta'zîr* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zîr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarîmah-jarîmah ta'zîr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. *Jarîmah ta'zîr* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini

jarîmah-jarîmah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudûd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.³¹

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam ketiga klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) di atas masuk ke dalam klasifikasi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, karena perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) tidak ditentukan atau tidak terdapat dalam kategori *jarimah hudud* ataupun *qishash/diyat*, sehingga merupakan lingkup dari *jarimah ta'zir*. Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan atau nama baik dari seseorang. Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan *jarimah qadzaf* dalam klasifikasi *jarimah hudud* sama, yaitu sama-sama menyangkut dengan kehormatan dan nama baik seseorang.

³¹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Namun, perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) ini tidak dapat dihukum dengan hukuman *qadzaf*, hal ini dikarenakan bahwa *qadzaf* merupakan hukuman yang sudah Allah SWT tetapkan rukun dan syarat yang menjadikan unsur dari suatu tindak pidana (*jarimah*), sehingga apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka bukan bagian dari *jarimah qadzaf* dan tidak pula dihukum dengan *jarimah qadzaf*.

Unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) dilihat dari unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1) *Rukun Syar'i* (Unsur Formil)

Unsur formil adalah adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau dapat dijatuhi hukuman. Dasar larangan perbuatan yang berhubungan dengan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim (QS. Al-Hujurat: 11).³²

b) Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 2012, hlm. 812.

lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 12).³³

2) *Rukun Al-Maddi* (Unsur Materil)

Unsur materil, yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah* atau tindak pidana, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini penyebaran ujaran kebencian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan anjuran *syari'at* Islam, sehingga perbuatan penyebaran ujaran kebencian merupakan perbuatan yang melawan hukum.

3) *Rukun Al-Adabi* (Unsur Moral)

Unsur moral, maksudnya pelaku penyebaran ujaran kebencian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang dianggap dapat

³³ *Ibid.*,

mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang sudah cakap hukum atau *mukallaf*.³⁴

3. Sanksi

Sanksi berupa pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.³⁵ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁶

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut pemidanaan/hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa

³⁴ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 197.

³⁵ Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th., hlm. 612.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 613.

sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, pembedaan adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Pembedaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."³⁷

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pembedaan adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan sanksi atau pembedaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu

³⁷Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.³⁸

Terkait dengan sanksi atas perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*), jika dilihat dari macam-macam sanksi *ta'zir* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) tergantung kepada kemaslahatan ummat. Karena penjatuhan sanksi *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan. Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan sanksi yang teringan adalah hukuman peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kulaitas maupun kuantitas, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadian dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.³⁹

³⁸ Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

³⁹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013, hlm. 181

Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang mengatakan “sanksi *ta'zir* (berat-ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”. Juga kaidah yang berbunyi “berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Sudah barang tentu, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan daya preventif dan represifnya (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut, serta daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Diketahui bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya hakim juga harus selalu berpedoman kepada asas-asas yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana Islam, seperti asas keadilan (proporsional), asas kepastian hukum (sesuai dengan anjuran *syari'ah*) serta asas kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman (melihat dari segi manfaat dan *madharatnya*). Hal tersebut bertujuan agar terjadi keadilan dalam menetapkan sebuah hukuman atau sanksi, baik berupa hukuman badan, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, hukuman yang

berkaitan dengan harta, ataupun hukuman dalam bentuk lain, seperti misalnya teguran dan peringatan.⁴⁰

Penanganan sebelum mengarah kepada penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam terdapat kesamaan dengan hukum positif Indonesia, yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan *jarimah* dan membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri pelaku *jarimah*. Apabila kegiatan pencegahan telah dilakukan namun pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) tidak jera, maka hakim dapat melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dalam *ta'zir*.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik sangat penting dalam hukum Pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama dalam

⁴⁰ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 199.

pembentukan hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikenal dengan *al-Maqasida asy-Syari'ah* atau tujuan hukum Islam: *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Mal* (menjaga harta) dan *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentu memiliki peraturan yang mengharamkan perbuatan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai bentuk larangan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa) untuk tidak dilaksanakan, larangan tersebut terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.⁴¹

Ancaman sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengancam pelaku penyebaran

⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, hlm. 14.

ujaran kebencian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, karena pemenjaraan juga merupakan salah satu bentuk dari sanksi *ta'zir* yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan *jarimah* atau tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

BAB III

PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR

421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM DALAM KASUS TINDAK

PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN

A. Sekilas Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Sejak zaman Hindia Belanda, Pengadilan Negeri sudah ada dan sejak itu, Pengadilan Negeri dibagi menjadi dua yaitu : Pengadilan untuk orang-orang pribumi, dan Pengadilan untuk orang-orang golongan Eropa atau Timur Asing. Setelah kemerdekaan, kedua pengadilan tersebut dilebur menjadi Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan di Indonesia ada tiga yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer.¹

Dengan adanya Undang-undang baru Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibentuklah menjadi empat pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri,

¹<https://pn-jakartatimur.aru/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarahpengadilan.html>, diakses 5 Oktober 2019

Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun peradilan umum telah ada ketentuannya di samping yang telah disebutkan di atas juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dahulu Pengadilan di Jakarta hanya satu sebelum tahun 1969 yang disebut “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” (yang sekarang kantornya menjadi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat). Tahun 1970 Pengadilan Negeri Jakarta ada tiga yaitu : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 31 maret 2004 telah dilakukan pengalihan organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha Negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan presiden nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 maret 2004.²

Jadi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya dibawah Departemen kehakiman dan Ham sekarang berada dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Jakarta Timur yang beralamat di Jl. DR. Sumarno No.1 (Sentra Primer) Penggilingan, Jakarta Timur merupakan Lembaga peradilan dengan wilayah hukum Jakarta Timur, dan saat ini sebagai Ketua Pengadilan

²<https://pn-jakartatimur.aru/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/ejarah-pengadilan.html>, diakses 5 Oktober 2019

Negeri Jakarta Timur adalah H. Sumino, SH.,MHum.³ Pengadilan Negeri Jakarta Timur (disingkat PN Jakarta Timur) adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Kota Jakarta Timur.⁴

B. Duduk Perkara

Di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, setiap orang dapat mengakses apa saja yang dicarinya, sehingga teknologi informasi dapat menguntungkan manusia. Namun, ada juga orang yang mungkin faktor iseng atau memang sengaja membuat informasi-informasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan perpecahan. Hal ini dilakukan atas dasar motif yang berbeda-beda. Ujaran kebencian akan tampak jika kita membuka dan mengakses internet dengan beragam menu. Hal inilah yang dilakukan oleh orang yang kebetulan berdomisili di Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebut saja,

³<https://pn-jakartatimur.aru/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/ejarah-pengadilan.html>, diakses 5 Oktober 2019

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri_Jakarta_Timur, diakses 5 Oktober 2019

Bambang Kiswotomo, seorang yang memang ahli dibidang teknologi informasi. Ia pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 telah membuat cuitan yang isinya melahirkan rasa kebencian pada etnis atau keturunan China.

Ia menilai bahwa orang China pada waktu presidennya Jokowi demikian aktif membela Jokowi, bahkan di saat pencoblosan, kaum etnis China secara keseluruhan memilih Jokowi. Padahal sebelumnya, orang China itu sangat pasif dan sering golput.

Ujaran kebencian yang dimunculkan Bambang Kiswotomo mengandung permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dilakukan dengan cara menulis kata-kata sebagai berikut: *Mau ngelak lu niink? Dulu CINA anti Pemilu. Mrk lbh baik ttp dagang / liburan. Sejak ada JKW-Ahok, "Cina cacatpun" datang ke TPS. Bhkn berani curang.*

Dalam tulisan berikutnya Bambang Kiswotomo menulis lagi sebuah ujaran kebencian yang berbunyi: *Mayoritas, Cina itu memang babi bahkan Cina cacat mau mati di kursi roda dan*

pakai pempers pun ikut Nyoblos juga, semua demi menguasai NKRI.

Arti dari tweet pertama “Sejak Jokowi-Ahok berkuasa, orang Cina datang ke TPS ikut pemilu dan berani berbuat curang. Padahal, dulu orang Cina anti pemilu. Mereka lebih memilih berdagang dan berlibur”, merupakan kalimat deklaratif yang berisi penilaian atas suatu kondisi yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menyatakan suatu kondisi yang merupakan hasil penilaiannya bahwa semenjak Jokowi-Ahok berkuasa orang Cina datang ke TPS untuk ikut pemilu dan berbuat curang. Padahal, dulu (sebelum Jokowi-Ahok berkuasa) orang Cina lebih memilih berdagang dan berlibur. Kalimat ini menyatakan labelisasi negatif terhadap orang Cina yang dikatakan ikut Pemilu dan berbuat curang. Maksud kalimat ini secara jelas mencemooh orang Cina yang berhak ikut pemilu di Indonesia sebagai etnis yang dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu.

Rangkaian kalimat dalam tweet kedua “Bahkan, orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun

ikut nyoblos juga. Semua demi menguasai NKRI”, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan hasil penilaian pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas), yaitu bahwa orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun ikut memilih dalam Pemilu. Hal tersebut semata-mata dilakukan demi menguasai NKRI. Penilaian pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menunjukkan ketidaksukaan atau rasa benci terhadap etnis Cina dalam mengikuti Pemilu yang dinilainya sebagai upaya untuk menguasai NKRI. Selain itu, kalimat dalam tweet kedua ini bernada sebagai cemooh kasar dan pegginaan terhadap etnis Cina.

Kedua tweet yang dinyatakan pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) termasuk sebagai kalimat yang bermuatan kebencian berdasarkan SARA dan/atau berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sebab, dalam kalimat tersebut terdapat ujaran negatif terhadap sosok etnis Cina yang semestinya dihargai sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mengikuti pemilu.

Berdasarkan parameter yang Ahli, maka tulisan/kata-kata/kalimat dari pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas), itu tidak pantas untuk disampaikan di muka publik sebab tuturan tersebut menunjukkan adanya muatan kebencian terhadap etnis tertentu, dalam hal ini Cina, yang didasarkan pada pendapat subjektif sehingga komentar yang diungkap oleh pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) bermakna mengumbar kebencian terhadap entitas tertentu yang sangat berpotensi untuk direspon oleh sikap permusuhan dan atau kebencian karena cenderung menyudutkan dan menyerang kehormatan entitas tertentu.

Media sosial memang memfasilitasi orang-orang untuk mengekspresikan gagasannya. Kendati demikian, media sosial juga dapat menjelma buah simalakama. Beberapa orang mesti berurusan dengan hukum gara-gara menumpahkan isi kepala dan perasaannya terhadap pihak tertentu.

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk “dakwaan tunggal”⁵ bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukan tanpa alasan atau sekadar iseng seseorang membuat ujaran atau kriminalitas kebencian. Faktor utama yang memotivasinya adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian. Tak peduli rekam jejak positif yang dibuat objek ujaran kebenciannya, ia akan tanpa tedeng aling-alang menghakimi orang atau kelompok tersebut. Ujaran kebencian yang dilanggengkan dalam suatu lingkungan tempat seseorang

⁵ Yang dimaksud dakwaan tunggal yaitu dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya

tinggal dapat dipahami pula sebagai upaya membentuk kohesi sosial. Semakin besar level konformitas untuk mengutarakan kebencian, semakin besar kekuatan untuk menjatuhkan kelompok tertentu.

Satu contoh kasus Bambang Kiswotomo dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan si Objek memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentangnya. Bisa saja sebelumnya si Pembuat Ujaran Kebencian tak bermasalah dengan identitas si Objek. Namun, didorong rasa kecewa, ia mencomot identitas pelaku sebagai sasaran dan memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk percaya, latar belakang si Objeklah yang membuatnya menjadi musuh bersama. Motif ini bisa dikatakan sebagai motif balas dendam pembuat ujaran kebencian terhadap si Objek.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, menuntut agar Bambang Kiswotomo dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan bulan.

Ujaran kebencian ini mudah menular. Jika seseorang menganggap pembuat ujaran kebencian sebagai sosok yang kredibel, berkuasa, dipanut, atau diyakini setiap ucapannya adalah kebenaran, maka ia akan menyebarkan berita-berita buruk serupa soal objek ujaran kebencian. Tak peduli yang dikonsumsi dan didistribusikannya berita bohong atau opini personal sekalipun, selama ia bisa menyalurkan hasrat mengutarakan ketidaksukaannya, hal itu dianggap sah-sah saja untuk dibaca dan dibagikan. Untuk itulah Bambang Kiswotomo dituntut oleh Penuntut Umum bahwa Bambang Kiswotomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dakwaan dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UUU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada lagi alasan orang membuat ujaran kebencian. Perasaan terancam rupanya ditemukan oleh sejumlah peneliti bahwa penyebab munculnya kata-kata merendahkan si objek, motif ini disebut dengan motif defensif. Khawatir negerinya dijajah secara ekonomi orang-orang nonpribumi, pembuat ujaran kebencian pun melancarkan aksinya. Ujungnya bisa sangat mengerikan.

E. Pertimbangan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian

Di dunia masih ada banyak sekali kebencian ada saja kebencian antar keluarga, kebencian antar teman , atau bahkan benci akan orang yang tidak kita ketahui, tapi apa sih arti kebencian itu sebenarnya. Kebencian adalah emosi yang sangat kuat atau ketidaksukaan kepada seseorang , barang , atau pun fenomena sesuatu. Hal ini juga merupakan keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkan sesuatu, dan pada jaman sekarang ini orang banyak sekali memakai media sosial. Atas dasar itulah Hakim PN Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada Bambang Kiswotomo dengan memuat sejumlah pertimbangan.

Pertimbangan pertama, bahwa dengan mencermati kedua postingan Terdakwa, didalamnya termuat kata: Cina, yang artinya, kedua postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada ras Cina. Oleh karena kedua postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada ras Cina, maka yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah

kedua postingan tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap ras Cina? Hal ini juga parallel dengan pendapat Ahli bahasa DR Andika Dutha Bachari, SPd., M.Hum. yang mengatakan bahwa “ujaran kebencian“ adalah rasa tidak senang yang menimbulkan *emotional state* (kondisi emosional) yang tidak senang terhadap suatu hal atau persoalan;

Dalam pertimbangan kedua, Hakim PN Jakarta Timur menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, ia memposting kedua ujaran tersebut adalah karena Terdakwa kecewa dan kesal melihat orang-orang Cina ikut mencoblos untuk memenangkan JKW-Ahok, padahal menurut Terdakwa, sebelumnya orang-orang Cina sangat malas memilih dalam pemilihan kepala daerah, mereka lebih baik tetap berdagang atau berlibur kalau pas ada kegiatan pemilihan kepala daerah sekalipun mereka sebenarnya memiliki hak untuk ikut memilih. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Terdakwa memposting kedua ujarannya tersebut jelas ditujukan kepada orang Cina, karena dapat disimpulkan tuduhan Terdakwa terhadap orang Cina dalam postingannya tidaklah terlepas dari fakta dimana Ahok selaku

pemimpin daerah DKI Jakarta pada waktu itu (tanggal 17 Februari 2017) adalah berasal dari etnis keturunan Cina, yang artinya berkaitan dengan etnis atau ras yang dituduhkan Terdakwa dalam psotingannya tersebut, yakni orang-orang Cina, sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli bahasa DR Andika Dutha Bachari, SPd., M.Hum., Terdakwa mengasumsikan orang Cina sebagai hewan babi yang bagi umat muslim disimbolkan sebagai hewan yang diharamkan, dan menurut ahli, hal ini adalah *negative judgement* (tuduhan negatif), dan menurut Terdakwa sendiri, di persidangan, ia menyadari bahwa kedua postingannya tersebut dapat menimbulkan rasa ketersinggungan bagi etnis Cina.

Dalam pertimbangan ketiga, Hakim PN Jakarta Timur menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang terbukti dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *Noodzakelijkheidbewustzijn*), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, bahwa kedua postingannya akan menimbulkan ketersinggungan bagi etnis Cina.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa memposting kedua ujaran tersebut adalah agar pembaca dapat memahami perasaan batin Terdakwa, yaitu yang sedang kesal dan kecewa terhadap JKW-Ahok sehingga pembaca ikut menjadi kesal dan kecewa sebagaimana yang dirasakan oleh Terdakwa.

Dalam pertimbangan keempat, Hakim PN Jakarta Timur menimbang, bahwa namun demikian, apakah dengan postingan Terdakwa tersebut pembaca ikut merasa kesal dan kecewa terhadap JKWAhok, hal itu tidak menjadi penting, meskipun tidak tertutup kemungkinan orang yang membaca postingan Terdakwa ada yang ikut merasakan hal yang sama, karena yang penting dalam hal ini adalah postingan Terdakwa yang diakibatkan rasa kesal dan kecewa terhadap JKW-Ahok telah dibaca oleh pembaca, dan secara implisit Terdakwa menginginkan agar apa yang disampaikan dalam postingan tersebut diikuti oleh pembaca, inilah aspek menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yang berasal dari Terdakwa sendiri. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Dalam pertimbangan kelima, Hakim PN Jakarta Timur menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, dan sebaliknya majelis hakim tidak

sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan Pasal 45A tidak perlu dipertimbangkan karena pasal tersebut adalah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pertimbangan keenam, Hakim PN Jakarta Timur menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena pidana

yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan. Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 45A, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, yang besarnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam amar putusan ini, dan dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Dalam pertimbangan ketujuh, Hakim PN Jakarta Timur Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut; Hal-hal yang meringankan: 1) Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi; 2) Terdakwa belum pernah dipidana. Adapun hal-hal yang memberatkan: perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keharmonisan hubungan silaturahmi di tengah-tengah masyarakat

yang pluralistis. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Di era yang sudah kian berkembang maju di mana demokrasi diyakini juga sudah berjalan sedemikian rupa, nyatanya masyarakat Indonesia masih terus menemukan beragam kasus ujaran kebencian dalam kehidupan sehari-harinya. Jika dulu banyak terkait suku, ras atau antar-agama, kini banyak soal perbedaan politik, bahkan paham pemikiran.

Yang membuat miris, perkembangan teknologi di era digital justru turut dimanfaatkan untuk memperluas penyebaran ujaran-ujaran kebencian tersebut, terutama lewat jalur media atau jejaring sosial. Akibatnya, hampir sepanjang waktu setiap harinya,

bisa ditemukan beragam unggahan atau postingan semacam itu, baik dalam wujud teks, gambar, hingga video.

Perkembangan lainnya adalah fenomena ramainya pelaporan ke institusi penegak hukum, bahkan kerap kali saling lapor antara dua pihak berlawanan, yang oleh aparat sendiri sebagian besar juga cukup cepat ditindaklanjuti. Penggunaan UU ITE yang sedari awal kehadirannya sudah mengundang kontroversi, pun akhirnya kian banyak terdengar.

F. Amar Putusan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita umum (*common basic idie*) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan

undang-undang yang bersangkutan. Atas dasar itulah, Hakim PN Jakarta Timur dalam amar putusannya menyatakan:

1. Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Kiswotomo Alias Ibhas Taruno Alias T. Kiswotomo (Ibhas), oleh karena itu, **selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis memberi komentar sebagai berikut:

Pada intinya, Bambang Kiswotomo pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 telah melakukan ujaran kebencian melalui twitter sebagai salah satu media yang digunakan terdakwa. Ujaran kebencian tersebut menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*. Sebagaimana diketahui, twitter adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas

Bambang Kiswotomo menyebarkan informasi tersebut di atas adalah bertempat di Jl. Diklat Depsos No. 25 RT/RW: 13/03, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak *menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam penyelidikan online pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, Saksi Naufal Ahmad Ramadhan, Gunawan bersama-sama dengan Chandra Purnama (ketiganya merupakan Petugas Kepolisian) mendapat informasi terkait akun twitter Terdakwa, dengan nama akun T. Kiswotomo (Ibhas),

Isi twitter yang ditulis oleh Bambang Kiswotomo sebagai berikut:

1. Kalimat dalam tweet pertama berisi ujaran kebencian sebagai berikut: “Sejak Jokowi-Ahok berkuasa, orang Cina datang ke TPS ikut pemilu dan berani berbuat curang. Padahal, dulu orang Cina anti pemilu. Mereka lebih memilih berdagang dan berlibur”, merupakan kalimat deklaratif yang berisi penilaian atas suatu kondisi yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menyatakan suatu kondisi yang merupakan hasil penilaiannya bahwa semenjak Jokowi-Ahok berkuasa orang Cina datang ke TPS untuk ikut pemilu dan berbuat curang. Padahal, dulu (sebelum Jokowi-Ahok berkuasa) orang Cina lebih memilih berdagang dan berlibur.

Kalimat ini menyatakan labelisasi negatif terhadap orang Cina yang dikatakan ikut Pemilu dan berbuat curang. Maksud kalimat ini secara jelas mencemooh orang Cina yang berhak ikut pemilu di Indonesia sebagai etnis yang dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu.

2. Kalimat dalam tweet kedua berisi ujaran kebencian sebagai berikut: “Bahkan, orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun ikut nyoblos juga. Semua demi menguasai NKRI”, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan hasil penilaian pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas), yaitu bahwa orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun ikut memilih dalam Pemilu. Hal tersebut semata-mata dilakukan demi menguasai NKRI. Penilaian pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menunjukkan ketidaksukaan atau rasa benci terhadap etnis Cina dalam mengikuti Pemilu yang dinilainya sebagai upaya untuk menguasai NKRI. Selain itu, kalimat dalam tweet kedua ini

bernada sebagai cemooh kasar dan pegginaan terhadap etnis Cina.

Kedua tweet yang dinyatakan pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) termasuk sebagai kalimat yang bermuatan kebencian berdasarkan SARA dan/atau berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sebab, dalam kalimat tersebut terdapat *judgement* (penilaian) negatif terhadap sosok etnis Cina yang semestinya dihargai sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mengikuti pemilu.

Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Kiswotomo itu, **selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN
JAKARTA TIMUR NOMOR 421/PID.SUS/2018/PN JKT.TIM
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN
KEBENCIAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian

Pada intinya, Bambang Kiswotomo pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 telah melakukan ujaran kebencian melalui twitter sebagai salah satu media yang digunakan terdakwa. Ujaran kebencian tersebut menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*. Sebagaimana diketahui, twitter adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas

Bambang Kiswotomo menyebarkan informasi tersebut di atas adalah bertempat di Jl. Diklat Depsos No. 25 RT/RW: 13/03, Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih berwenang mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak *menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam penyelidikan online pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, Saksi Naufal Ahmad Ramadhan, Gunawan bersama-sama dengan Chandra Purnama (ketiganya merupakan Petugas Kepolisian) mendapat informasi terkait akun twitter Terdakwa, dengan nama akun T. Kiswotomo (Ibhas),

Isi twitter yang ditulis oleh Bambang Kiswotomo sebagai berikut:

1. Kalimat dalam tweet pertama berisi ujaran kebencian sebagai berikut: “Sejak Jokowi-Ahok berkuasa, orang Cina datang ke TPS ikut pemilu dan berani berbuat curang. Padahal, dulu

orang Cina anti pemilu. Mereka lebih memilih berdagang dan berlibur”, merupakan kalimat deklaratif yang berisi penilaian atas suatu kondisi yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menyatakan suatu kondisi yang merupakan hasil penilaiannya bahwa semenjak Jokowi-Ahok berkuasa orang Cina datang ke TPS untuk ikut pemilu dan berbuat curang. Padahal, dulu (sebelum Jokowi-Ahok berkuasa) orang Cina lebih memilih berdagang dan berlibur. Kalimat ini menyatakan labelisasi negatif terhadap orang Cina yang dikatakan ikut Pemilu dan berbuat curang. Maksud kalimat ini secara jelas mencemooh orang Cina yang berhak ikut pemilu di Indonesia sebagai etnis yang dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu.

2. Kalimat dalam tweet kedua berisi ujaran kebencian sebagai berikut: “Bahkan, orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun ikut nyoblos juga. Semua demi menguasai NKRI”, merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan hasil penilaian pemilik/pengguna twitter dengan

nama T. Kiswotomo (Ibhas), yaitu bahwa orang Cina cacat yang mau mati di kursi roda dan pakai pampers pun ikut memilih dalam Pemilu. Hal tersebut semata-mata dilakukan demi menguasai NKRI. Penilaian pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) menunjukkan ketidaksukaan atau rasa benci terhadap etnis Cina dalam mengikuti Pemilu yang dinilainya sebagai upaya untuk menguasai NKRI. Selain itu, kalimat dalam tweet kedua ini bernada sebagai cemooh kasar dan pegginaan terhadap etnis Cina.

Kedua tweet yang dinyatakan pemilik/pengguna twitter dengan nama T. Kiswotomo (Ibhas) termasuk sebagai kalimat yang bermuatan kebencian berdasarkan SARA dan/atau berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sebab, dalam kalimat tersebut terdapat *judgement* (penilaian) negatif terhadap sosok etnis Cina yang semestinya dihargai sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mengikuti pemilu.

Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang

Kiswotomo itu, **selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

Pertimbangan Hukum oleh Hakim PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya sebagai unsur yang meringankan adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Kiswotomo itu, **selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**

Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Jakarta Timur. Meskipun pelaku mengakui terus terang perbuatannya, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang mengakui terus terang perbuatannya; pelaku belum pernah dihukum, namun kurang tepat dengan memberikan hukuman yang sangat terlalu ringan, yaitu

hukuman **1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan)**. Alasannya sebagai berikut:

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, menegaskan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PN Jakarta Timur yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama **1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan)**, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yaitu **6 (enam) tahun**. Jika PN Jakarta Timur bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun.

Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3 tahun atau setidak-tidaknya di atas 1 tahun 6 bulan.

Menurut penulis, hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversil sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Menurut penulis, perbuatan Terdakwa Bambang Kiswotomo yang telah melakukan ujaran kebencian melalui twitter menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat* sehingga dapat mengganggu keharmonisan hubungan silaturahmi di tengah-tengah masyarakat yang pluralistis.

Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan perbuatan tercela, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Kembali pada pertimbangan hakim PN Jakarta Timur, bahwa pertimbangan pokok lainnya dari majelis hakim yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Kiswotomo dengan pidana penjara selama: satu tahun, enam bulan.

Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Jakarta Timur bahwa hanya karena terdakwa

belum pernah dihukum, lalu Hakim menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Alasan pertimbangan hukum hakim bersifat normatif dan tidak bisa jadi alasan menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan sanksi pidana yang tertera dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yaitu 6 tahun penjara.

Demikian pula bahwa hanya karena pelaku berlaku sopan di persidangan, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, lalu Hakim PN Jakarta Timur menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa jadi dasar untuk menyimpang dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik .

Penulis tidak sependapat dengan putusan PN Jakarta Timur karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya satu tahun, enam bulan. Padahal pasal yang di dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Jakarta Timur adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE

(Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, menegaskan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, pidana penjaranya adalah 6 tahun. Meskipun pidana penjara itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum satu tahun enam bulan, maka terlalu tidak seimbang, menurut penulis seharusnya minimal diberikan hukuman setengahnya dari hukuman maksimal yaitu 3 tahun penjara,

Putusan PN Jakarta Timur sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan seperti teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi

jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Perspektif hukum positif, teori pidanaaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pidanaaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

terasa pengaruhnya pada zaman modern.² Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:⁴

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

"...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁵

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

⁵ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 153.

- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013, hlm. 35.

- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pembedaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁷

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

⁷ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 53.

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam

kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁸

Tipe absolut yang *proporsionalitas* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan preventif umum sekalipun.⁹

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu

⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 83-84.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.*, hlm. 15.

keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau

mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹⁰

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan,

¹⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18

mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.¹¹

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹² Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.¹³

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari

¹¹ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 35-36.

¹² Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 36.

¹³ Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 496.

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka **menjadikan terpidana jera** untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁵

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas, hlm. 185.

¹⁵ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori.*, hlm. 17

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat

diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (**jera**). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP Tahun 2012) telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:¹⁷

1. Pemidanaan bertujuan

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

¹⁷ Rancangan Undang-undang (RUU Konsep KUHP Tahun 2012).

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Putusan PN Jakarta Timur bertentangan dengan tujuan pidanaan. Seperti di ketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pidanaan selain bersifat edukatif (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera karena terpidana menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Putusan PN Jakarta Timur memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata melakukan ujaran kebencian itu hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan tindak pidana seperti itu.

Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang– undang ini.

Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:

- a. Dalam pasal 191 butir 1 KUHAP, Putusan bebas (*vrijsppraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹⁸
- b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

¹⁸Uraian lebih dalam tentang macam-macam keputusan hakim dapat dibaca dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 280.

kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.¹⁹

- c. Pasal 193 butir 1 KUHAP Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.²⁰

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

¹⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 162.

²⁰Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014, hlm. 76.

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara ketentuan KUHAP telah memenuhi syarat tersebut.²¹ Akan tetapi putusan tersebut sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku.

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena

²¹Lebih dalam dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 283.

menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak akan mampu memperbaiki orang itu sehingga tidak

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Amar Putusan PN Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya, sebagai unsur yang meringankan adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa berlaku sopan di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Jakarta Timur menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bambang Kiswotomo **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**

Menurut hukum pidana Islam, pembedaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas

ketentuan-ketentuan syara'.²² Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pembedaan adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan sanksi atau pembedaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²³

Terkait dengan sanksi atas perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*), jika dilihat dari macam-macam sanksi *ta'zir*, maka penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) tergantung kepada kemaslahatan ummat. Karena penjatuhan sanksi *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan. Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan sanksi yang

²²Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

²³Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

teringan adalah hukuman peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kulaitas maupun kuantitas, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadian dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.²⁴

Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang mengatakan “sanksi *ta'zir* (berat-ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”. Juga kaidah yang berbunyi “berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Sudah barang tentu, penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan daya preventif dan represifnya (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut, serta daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Diketahui bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya hakim juga harus selalu berpedoman kepada asas-asas

²⁴ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013, hlm. 181

yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana Islam, seperti asas keadilan (proporsional), asas kepastian hukum (sesuai dengan anjuran *syari'ah*) serta asas kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman (melihat dari segi manfaat dan *madharatnya*). Hal tersebut bertujuan agar terjadi keadilan dalam menetapkan sebuah hukuman atau sanksi, baik berupa hukuman badan, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, hukuman yang berkaitan dengan harta, ataupun hukuman dalam bentuk lain, seperti misalnya teguran dan peringatan.²⁵

Penanganan sebelum mengarah kepada penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam terdapat kesamaan dengan hukum positif Indonesia, yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan *jarimah* dan membuat pelaku jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam ditambah dengan sikap pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri pelaku *jarimah*. Apabila kegiatan pencegahan

²⁵ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal 'Adliya* Vol. 12, No. 2, Juni 2018, hlm. 199.

telah dilakukan namun pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) tidak jera, maka hakim dapat melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dalam *ta'zir*.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik sangat penting dalam hukum Pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama dalam pembentukan hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikenal dengan *maqâsid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam: *hifz al-Nasl* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Mal* (menjaga harta) dan *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).²⁶

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentu memiliki peraturan yang mengharamkan perbuatan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai bentuk larangan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa) untuk tidak dilaksanakan, larangan tersebut terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa, setiap

²⁶ Imam Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., hlm. 7-8.

muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.²⁷

Ancaman sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengancam pelaku penyebaran ujaran kebencian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, karena pemenjaraan juga merupakan salah satu bentuk dari sanksi *ta'zir* yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan *jarimah* atau tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum pidana Islam, merupakan perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan atau nama baik dari seseorang, yaitu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, mencaci maki, menggunjing, dan sebagainya yang menyebabkan timbul rasa kebencian atau

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, hlm. 14.

permusuhan terhadap seseorang. Oleh karena itu, perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) masuk dalam klasifikasi *ta'zir* dalam kategori *jarimah* yang belum ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam ketiga klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) masuk ke dalam klasifikasi *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, karena perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) tidak ditentukan atau tidak terdapat dalam kategori *jarimah hudud* ataupun *qishash/diyat*, sehingga merupakan lingkup dari *jarimah ta'zir*.

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) masuk dalam *jarimah qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Alasannya sebagai berikut:

Qadzaf dalam arti bahasa adalah الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوَهَا artinya melempar dengan batu dan lainnya.²⁸ Dalam istilah syara', *qadzaf* ada dua macam, yaitu:

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 372.

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman had
2. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang yang *muhshan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.²⁹ Sedangkan arti *qadzaf* yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*.³⁰

Kelompok *qadzaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan mencaci maki orang dan dapat dikenakan hukuman ta'zir. Dalam uraian ini, yang kita bicarakan hanyalah *qadzaf* macam kedua, yaitu *qadzaf* yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Dalam memberikan definisi *qadzaf* ini, Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan bahwa *qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau

²⁹ Abd Al Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 455.

³⁰ *Ibid.*,

secara *dilalah* (tidak jelas).³¹ Contoh tuduhan yang *sharih* (jelas/tegas), seperti artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.

³¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 212.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. PN Jakarta Timur yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yaitu 6 (enam) tahun. Jika PN Jakarta Timur bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun. Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3 tahun atau setidaknya tidaknya di atas 1 tahun 6 bulan. Menurut penulis, hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversial sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai

pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

2. Dari segi hukum Islam, penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum pidana Islam, merupakan perbuatan yang menyangkut dengan kehormatan atau nama baik dari seseorang, yaitu berupa penghinaan, pencemaran nama baik, mencaci maki, menggunjing, dan sebagainya yang menyebabkan timbul rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang. Oleh karena itu, perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) masuk dalam klasifikasi *ta'zird* dalam kategori *jarimah* yang belum ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran-Saran

Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan memperluas wawasan dalam mengkaji hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Ti. Bagi pengkaji selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena itu dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampaui jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah untuk memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT meridhainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Dodo Zaenal, “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor* Vol. 10 No. 2 Oktober 2015 ISSN 1907-6738.

Anggara, Adreanus Sapta, *Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebar Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*, Skripsi: Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.

Choirroh, Lailatul Utiya, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565.

Duwila, Moh. Putra Pradipta, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial*”, **Skripsi**, Makasar : Universitas Hasanudin Makasar, 2016.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012

Mujahidin, Muhammad, “*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, **Skripsi**: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Peraturan Kapolri nomor SE (Surat Edaran)/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*)

Pratama, A. Yudha, “*Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015*”, Skripsi, Lampung : Universitas Lampung, 2016.

Safitri, Ria, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Perguruan Tinggi (*Law on Electronic Information and Transactions for Universities*)”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* FSH UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), pp.197-218, DOI:
10.15408/sjsbs.v5i3.10279.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI
Press, 2010.

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

Sumadi, Hendy, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal
Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015.

Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar
Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota
IKAPI, 2013.

Sunarso, Siswantio, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*,
Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

A DATA PRIBADI

1. Nama : MunifAinunajib
2. Jeniskelamin : Laki-laki
3. TempatTanggalLahir : Kab.Semarang, 02 Juni 1995
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belummenikah
6. Agama : Islam
7. Alamat :Jl.YosSudarso, BlantenRt 03 Rw 08,
DesaNyatnyono, KecamatanUngaran Barat,
Kab.Semaran
8. No Telpn : 0813-2616-7129

B PENDIDIKAN

1. RA Islam Istiqomah 1999-2001
2. SD Islam Istiqomah 2001-2007
3. MtsFutuhiyyah 1 2007-2010
4. MA Futuhiyyah 1 2010-2013

C PENGALAMAN ORGANISASI

1. IkatanMahasiswa Semarang
2. Anngota BPD DesaNyatnyono

DemikiandaftarriwayathidupiniSayabuatdengansejujursungguhnyaya.

Kab.Semarang, 11 Oktober 2019

HormatSaya

MUNIF AINUNAJIB